

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan mengkaji pada masalah perkembangan ekonomi di negara terbelakang untuk mencapai sebuah pembangunan ekonomi yang lebih cepat menurut pengakuan negara-negara maju bahwa kemiskinan di satu tempat merupakan ancaman bagi kesejahteraan di mana pun, hal tersebut merangsang minat terhadap topik ini.¹ Pembangunan ekonomi dilakukan dengan perencanaan upaya pemerintah berupa mengkoordinir pengambilan keputusan ekonomi jangka panjang dan beberapa kasus bahkan mengontrol tingkat pertumbuhan suatu negara melalui variabel ekonomi (konsumsi, pendapatan, investasi, pengangguran, tabungan, ekspor, impor dan lain sebagainya) demi mewujudkan serangkaian tujuan yang sudah direncanakan.²

Definisi mengenai kemiskinan sebagai penyebab utama keterbelakangan. Kemiskinan menjadi masalah yang erat kaitannya dengan beberapa faktor yaitu tingkat pendapatan, tingkat pengangguran, tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, tempat tinggal, geografi, status sosial, lingkungan dan gender.³ Kemiskinan merupakan permasalahan sentral di seluruh negara di dunia terutama negara berkembang seperti Indonesia. Menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir dalam mengentaskan kemiskinan dalam suatu negara.⁴ Mengurangi angka kemiskinan dilakukan dengan peningkatan pembangunan ekonomi yang telah menjadi sebuah proses dengan melibatkan berbagai elemen

¹ M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2012), 1.

² Eko Sudarmanto et al., *Ekonomi Pembangunan (Tinjauan Manajemen Dan Implementasi Pembangunan Daerah)* (Global Eksekutif Teknologi, 2022).

³ Dewi Martini and Nenik Woyanti, "Analisis Pengaruh PDRB, IPM, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan 35 Kab/Kota Di Provinsi Jawa Tengah (2016-2020)," *BISECER (Business Economic Entrepreneurship)* 5, no. 2 (2022): 24.

⁴ M.Abd.Nasir, Theresia Ayu Sani Hutabarat, Moehammad Fathorrazi, "Pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia Dan Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2021," *Academia.Edu* 7, no. 1 (2023): 2, https://www.academia.edu/download/62897926/pembelajaran_blended_learning_dengan_quipper_school20200410-95453-xv3jwe.pdf.

mikro dan makro seperti inflasi, pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.⁵ Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 tujuan suatu pembangunan nasional di Indonesia adalah peningkatan kesejahteraan umum.⁶ Parameter utama kesuksesan pembangunan suatu negara adalah berkurangnya proporsi penduduk miskin.⁷

Kemiskinan tidak bisa ditafsirkan begitu saja, namun memahami fenomena tersebut memerlukan pendekatan multidimensi berupa pendekatan pembangunan sosial untuk memahami fenomenanya. Pembangunan sosial adalah suatu proses perubahan sosial yang tersusun untuk tujuan peningkatan taraf hidup masyarakat, dan merupakan pembangunan yang dilaksanakan sebagai pelengkap proses pembangunan ekonomi. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan konsep pembangunan sosial.⁸ Memaknai kemiskinan dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut sangat penting untuk mencapai tujuan pengembangan kebijakan pengentasan kemiskinan dengan cepat. Hal ini menjadi perhatian pemerintah Indonesia dalam pengentasan kemiskinan.⁹

Indonesia adalah negara berkembang dan kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang perlu segera diatasi. Garis Kemiskinan International yang diberlakukan oleh Bank Dunia (*World Bank*) sebesar \$ 2,15 atau 32.752/orang/hari pada tahun 2022.¹⁰ Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2023 kemiskinan dianggap sebagai kondisi ekonomi masyarakat yang tidak dapat menutupi makanan pokok dan kebutuhan lain yang diukur dengan pengeluaran.

⁵ Nihat Doğanalp, Baki Ozsolak, and Alper Aslan, “The Effects of Energy Poverty on Economic Growth: A Panel Data Analysis for BRICS Countries,” *Environmental Science and Pollution Research* 28, no. 36 (2021), 50168.

⁶ Ridho Andykha, Hernimati Retno Handayani, and Nenik Woyanti, “Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, Dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah” 33, no. 2 (2018), 114.

⁷ Dewi Martini and Nenik Woyanti, “Analisis Pengaruh PDRB, IPM, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan 35 Kab/Kota Di Provinsi Jawa Tengah (2016-2020),” *BISECER (Business Economic Entrepreneurship)* 5, no. 2 (2022), 24.

⁸ Romi Sukma, “Strategi Pembangunan Sosial: Upaya Pengentasan Masalah Kemiskinan,” *BKD Provinsi Sumatera Barat*, 1.

⁹ Mirza Fuady, Muhammad Rafi Farrel Fuady, and Fahmi Aulia, “Kemiskinan Multi Dimensi Dan Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia,” *Tataloka* 24, no. 4 (2022), 331.

¹⁰ The World Bank, *World Bank East Asia and Pacific Economic Update, October 2022 : Reforms for Recovery, International Bank for Reconstruction and Development*, 2022, 4.

Masyarakat dengan kelompok pengeluaran di bawah garis kemiskinan termasuk dalam golongan miskin.¹¹

Kemiskinan dikaitkan dengan perilaku yang terkesan tidak rasional dan negatif di banyak bidang kehidupan ekonomi baik negara maju maupun berkembang.¹² Konsep kemiskinan telah dipelajari dan diadaptasi di berbagai negara berkembang termasuk di Indonesia. Penyebaran masyarakat miskin di Indonesia masih tergolong tinggi dan merupakan terbesar dalam daftar negara miskin.¹³ Indonesia negara penyumbang penduduk terbesar ketiga di dunia dengan jumlah penduduk sekitar 275,773,8 juta jiwa pada tahun 2022, memiliki masalah kemiskinan yang serius.¹⁴ Kemiskinan dapat menimbulkan permasalahan sosial lainnya seperti meningkatnya permukiman kumuh, anak jalanan yang sebagian besar putus sekolah, kriminalitas dan lain-lain. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan salah satu tujuan pembangunan yang harus dikaji secara berkala.¹⁵

Pengentasan Kemiskinan adalah salah satu prioritas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2025-2045). Tingkat kemiskinan mengalami penurunan, didukung dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka dan penguatan perlindungan sosial antara lain jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan. Di tengah gejolak ekonomi yang tinggi, tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka

¹¹ Badan Pusat Statistik Indonesia, “Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2023,” *Badan Pusat statistik*, no. 57 (2023): 8, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>.

¹² Ernst Jan de Bruijn and Gerrit Antonides, *Poverty and Economic Decision Making: A Review of Scarcity Theory, Theory and Decision*, vol. 92 (Springer US, 2022): 6, <https://doi.org/10.1007/s11238-021-09802-7>.

¹³ M.Abd.Nasir, Theresia Ayu Sani Hutabarat, Moehammad Fathorrazi, “Pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia Dan Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2021,” *Academia.Edu* 7, no. 1 (2023): 2, https://www.academia.edu/download/62897926/pembelajaran_blended_learning_dengan_quipper_school20200410-95453-xv3jwe.pdf.

¹⁴ Juvico Akbar Karuniawan and Aris Soelistyo, “Pengaruh Pengangguran, Pengeluaran Pemerintah Dan Inflasi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2016-2020,” *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional* 4, no. 3 (2022), 110.

¹⁵ Lily Leonita and Rini Kurnia Sari, “Pengaruh PDRB, Pengangguran, Dan Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Indonesia,” *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 3, no. 2 (2019), 2.

menunjukkan penurunan yang signifikan.¹⁶ Lonjakan angka kemiskinan terjadi meningkat di tahun 2020 akibat pandemi. Permasalahan kemiskinan hampir terjadi di semua wilayah Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan pusat perekonomian dan pemerintahan, dengan jumlah penduduk yang merupakan sumber penduduk terbesar Indonesia.¹⁷ Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi dengan penyumbang penduduk miskin terbanyak ke 2 di Pulau Jawa. Presentase kemiskinan Jawa Tengah masih diatas rata-rata presentase kemiskinan nasional pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2021 angka presentasi kemiskinan nasional mencapai 9,71 pada tahun 2021 dan 7,53 pada tahun 2022. Presentase tersebut menjadikan 3 provinsi dengan presentase lebih tinggi daripada presentase kemiskinan nasional, presentase kemiskinan di pulau Jawa sebagai berikut :

Tabel 1. 1. Presentase Kemiskinan Provinsi di Pulau Jawa

Provinsi	Presentase Kemiskinan Tahun 2021	Presentase Kemiskinan Tahun 2022
Banten	6,66	6,16
Jawa Timur	11,4	10,38
DIY	12,8	11,34
Jawa Tengah	11,79	10,98
Jawa Barat	8,4	8,06
DKI Jakarta	4,72	4,69

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 1.1 Presentase angka kemiskinan di 3 Provinsi Pulau Jawa masih diatas presentasi kemiskinan nasional selama 2 tahun terakhir. Jawa Tengah menduduki presentasi kemiskinan ke 2 setelah DIY. Pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah belum dilakukan secara optimal oleh kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, perlu dicermati beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan 2 tahun terakhir yang selalu berada di atas kemiskinan nasional. Dalam kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia, pemerintah memiliki Keputusan

¹⁶ Bappenas, “Rencana Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 - 2045,” *Bappenas* (Jakarta, 2023).

¹⁷ Urwatut Diyanah and Syamsul Huda, “Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Jumlah Penduduk Dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah,” *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 9 (2022), 2918.

Presiden No. 15 sejak tahun 2010. Pemerintah secara sistematis mengalokasikan program pengentasan kemiskinan berdasarkan sektor dimana intervensi dilaksanakan.¹⁸

Masalah kemiskinan memiliki solusi dan obat yang tercantum di dalam Al-Qur'an. Allah SWT memberikan rejeki kepada setiap makhluk di muka bumi ini, tugas setiap makhluk nya adalah berusaha menemukannya agar terhindar dari penderitaan kemiskinan.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦﴾

Artinya : *Dan tidak satu pun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam kitab nyata (lauhmahfuz) (Hud/11:6)*

Kementerian Agama Republik Indonesia menafsirkan bahwa Allah SWT menjamin persediaan makanan bagi siapa saja yang ingin berusaha mencari makan dan tidak hanya duduk diam menunggu makanan datang dengan sendirinya. Permasalahan penghidupan merupakan permasalahan yang sangat erat dengan keseharian masyarakat, apalagi cara masyarakat memandang hidup bahagia, kesulitan, dan kegembiraan tidak lepas dari permasalahan ini.¹⁹

Ketidakmampuan masyarakat untuk membeli barang/jasa dalam memenuhi kebutuhannya dikarenakan harga komoditas terus meningkat akibat adanya inflasi. Kemiskinan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor ekonomi seperti inflasi. Angka kemiskinan masih terus meningkat akibat tingginya tingkat inflasi di suatu daerah yang tidak kondusif bagi pengurangan angka kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil suatu kebijakan termasuk pengeluaran belanja negara yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.²⁰

¹⁸ Rakhmat and Firdaus, "Dinamika Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia" 1 (2019), 33.

¹⁹ Srianti Permata et al., "Strategi Penanganan Kemiskinan Dalam Perspektif Al-Quran," *Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2023), 165-166.

²⁰ R Kasim, D S M Engka, and H D Siwu, "Analisis Pengaruh Inflasi, Pengangguran Dan Belanja Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Kota Manado," *EMBA* 9, no. 1 (2021), 955.

Penelitian yang dilakukan oleh Diah Retnowati dan Harsuti bahwa terhadap pengaruh positif dan signifikan antara inflasi terhadap tingkat kemiskinan.²¹ Berikut presentase kemiskinan di Jawa Tengah yang dibandingkan dengan presentase kemiskinan nasional :

Tabel 1. 2. Presentase Inflasi di Jawa Tengah

Tahun	Presentase Inflasi Jawa Tengah	Presentase Inflasi Indonesia
2018	2,82	3,13
2019	2,81	2,72
2020	1,56	1,68
2021	5,03	1,87
2022	5,63	5,51

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa tingkat inflasi di Jawa Tengah mengalami fluktuatif pada tahun 2018 – 2022. Angka inflasi yang jauh diatas presentasi nasional pada tahun 2021 disebabkan oleh adanya lonjakan harga angkutan umum, perhiasan emas, daging ayam, minyak goreng, dan kendaraan sewa.²² Artinya suatu negara dianggap sukses atau tidak sukses dalam menyelesaikan permasalahan perekonomian negara yang dinyatakan melalui perekonomian makro dan mikro. Ketika inflasi meningkat, standar hidup akan runtuh dan daya beli masyarakat menurun. Salah satu parameter ekonomi makroekonomi yang digunakan untuk mengetahui/mengukur kestabilan perekonomian suatu negara adalah tingkat kemakmuran masyarakat.²³ Kemiskinan akibat inflasi dapat berdampak pada rumah tangga berpendapatan rendah, sehingga mengakibatkan hilangnya perlindungan sosial yang besar dan penurunan standar hidup yang tidak dapat dibenarkan.²⁴ Inflasi di Jawa Tengah masih tergolong ringan karena masih dibawah 10%. Namun, pemerintah harus mencermati

²¹ Diah Retnowati and Harsuti, “Pengaruh Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah,” *Jurnal Ekonomi* (2015), 608–618.

²² BPS, “Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Di Jawa Tengah,” *Berita Resmi Statistik Jawa Tengah* (Jawa Tengah, 2021), 2.

²³ R Susanto and Indah Pangesti, “Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia” 7, no. 2 (2020), 272.

²⁴ Weiqing Li et al., “Nexus between Energy Poverty and Energy Efficiency: Estimating the Long-Run Dynamics,” *Resources Policy* 72, no. June (2021).

fluktuasi yang sangat kuat melalui sejumlah kebijakan pengendalian inflasi.

Jawa Tengah pada tahun 2022 dihuni oleh 37.032.410 jiwa. Jumlah ini terus meningkat selama satu dekade. Peningkatan jumlah penduduk yang terus menerus dapat menyebabkan angka kemiskinan di wilayah Jawa Tengah termasuk dalam kategori tinggi. Jumlah penduduk yang tinggi dapat mempengaruhi angka kemiskinan pada suatu daerah. Pertumbuhan penduduk yang pesat tanpa pemanfaatan sumber daya manusia dengan baik akan menjadikan penghalang peningkatan pembangunan ekonomi.²⁵ Faktor penyebab kemiskinan juga dapat dilihat dari sumber daya manusianya. Kualitas SDM dapat dinilai dengan menggunakan Indeks Kualitas Hidup/Indeks Pembangunan Manusia. Semakin rendah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka semakin rendah pula produktivitas tenaga kerja penduduknya. Produktivitas yang lebih rendah menyebabkan pendapatan yang rendah. Oleh sebab itu, pendapatan yang rendah mampu menjadikan jumlah penduduk miskin semakin meningkat.²⁶ Terlihat pada penelitian sebelumnya, oleh Theresia Ayu Sani Hutabarat, dkk. bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin.²⁷ Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ridho Andykha, dkk. bahwa peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat mengurangi jumlah angka kemiskinan.²⁸

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Tengah terus meningkat. kinerja IPM meningkat sebesar 0,63% pada tahun 2022 didukung oleh peningkatan seluruh faktor yang mempengaruhinya. Perlambatan pada tahun 2020 diakibatkan oleh adanya revisi

²⁵ Urwatut Diyanah and Syamsul Huda, “Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Jumlah Penduduk Dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah,” *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 9 (2022), 2919.

²⁶ Dewi Martini and Nenik Woyanti, “Analisis Pengaruh PDRB, IPM, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan 35 Kab/Kota Di Provinsi Jawa Tengah (2016-2020),” *BISECER (Business Economic Entrepreneurship)* 5, no. 2 (2022), 29-30.

²⁷ Theresia Ayu Sani Hutabarat, Mochammad Fathorrazi, “Pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia Dan Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2021.”

²⁸ Andykha, Handayani, and Woyanti, “Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, Dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah.”

penurunan belanja per kapita. Upaya untuk meningkatkan IPM tingkat provinsi, maka berbanding lurus dengan peningkatan IPM seluruh kabupaten/kota. Terkait perbandingan antar kabupaten/kota, tidak terdapat perubahan signifikan pada jenis capaian dan peringkat masing-masing provinsi.²⁹ Berikut merupakan tabel presentase Indeks Pembangunan Manusia :

Tabel 1. 3. Presentase Indeks Pembangunan Manusia

No	Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (%)		
		2020	2021	2022
1	Provinsi Jawa Tengah	71.87	72.16	72.79
2	Kota Magelang	78.99	79.43	80.39
3	Kota Surakarta	82.21	82.62	83.08
4	Kota Salatiga	83.14	83.60	84.35
5	Kota Semarang	83.05	83.55	84.08

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

Tabel 1.3. presentase Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tertinggi diduduki oleh Kota Salatiga sebesar 84,35%, sedangkan presentase IPM terendah masih dicapai oleh Kabupaten Brebes sebesar 67,03%. Faktor demografis dan geografis mampu mempengaruhi pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia pada suatu daerah. Hal tersebut menjadikan besarnya presentase IPM pada suatu daerah mampu mempengaruhi presentase IPM pada daerah yang berdekatan. Hal tersebut dikarenakan bahwa wilayah yang berdekatan mampu memberikan/mempengaruhi adanya ketergantungan spasial (wilayah) pada tingkat presentase IPM.³⁰ Pada bidang pendidikan anak usia 7 tahun di Kota Salatiga tahun 2021 mempunyai harapan mengenyam pendidikan selama 15,42 tahun atau setara dengan lamanya menempuh pendidikan Diploma 3 atau Sarjana. Presentase ini bertumbuh 0,01 tahun dibanding tahun 2020 dengan capaian 15,41 tahun. Rata-rata lama sekolah di Kota Salatiga penduduk dengan usia 25 tahun ke atas

²⁹ BPS, “Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah 2022,” *Berita Resmi Statistik Jawa Tengah* (Jawa Tengah, 2022), 2.

³⁰ Dina Novitasari and Laelatul Khikmah, “Penerapan Model Regresi Spasial Pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Jawa Tengah Tahun 2017,” *STATISTIKA Journal of Theoretical Statistics and Its Applications* 19, no. 2 (2019): 124.

tahun 2021 mencapai 10,66 meningkat 0,24 tahun dari tahun sebelumnya.³¹

Ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan karena tidak bekerja sehingga tidak memiliki pendapatan. Kemiskinan dan pengangguran memiliki keterkaitan dalam sebab dan akibatnya. Pengangguran menjadi sebab terjadinya peningkatan kemiskinan, menurunkan daya beli masyarakat, meningkatnya angka kriminalitas dan masalah sosial lainnya. Tingkat pengangguran menurut Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) presentase angkatan kerja yang hendak bekerja namun belum mempunyai pekerjaan. Pengangguran terbuka (TPT) menjadi indikator tingkat pengangguran yang paling sering digunakan, dengan pengertian bahwa angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan atau memang tidak memiliki pekerjaan. Peningkatan angka pengangguran yang ada diakibatkan oleh lapangan pekerjaan yang tidak dapat menampung jumlah angkatan kerja yang ada. Hal tersebut menjadikan tidak sebanding adanya angkatan kerja terhadap jumlah lapangan pekerjaan.³²

Tabel 1. 4. Perbandingan Presentase Pengangguran Terbuka di Tiga Provinsi

No	Kabupaten/Kota	Pengangguran Terbuka (%)		
		2020	2021	2022
1	Indonesia	7,07	6,49	5,86
2	Provinsi Jawa Tengah	6.48	5.95	5.57
3	Provinsi Jawa Timur	5.74	5.49	4.88
4	Provinsi Jawa Barat	9.82	8.31	7.44

Sumber : Badan Pusat Statistik

Presentase pengangguran terbuka di Jawa Tengah pada tahun 2020 mencapai peningkatan 2,04% atau meningkat 396 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya.³³ Penurunan angka pengangguran terbuka di Jawa Tengah pada 3 tahun terakhir dipengaruhi oleh beberapa faktor infrastruktur yang meningkat, upah

³¹ BPS, “Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2021 Kota Salatiga,” *Berita Resmi Statistik Kota Salatiga* (Kota Salatiga, 2021), 2.

³² Bappeda Provinsi Jawa Tengah, *Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023* (Jawa Tengah, 2023), IV-5.

³³ BPS, “Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah Agustus 2020,” *Berita Resmi Statistik Jawa Tengah* (Jawa Tengah, 2020), 1.

pekerja, angkatan kerja yang tersedia, dan kemudahan perizinan usaha.³⁴ Dalam meningkatnya taraf hidup masyarakat mengenai hubungan terhadap pekerjaan yang layak masih menjadi masalah di Provinsi Jawa Tengah. Dengan adanya permasalahan tersebut perlu adanya upaya dalam meningkatkan layanan yang layak bagi angkatan kerja terlebih pada angka pengangguran di Jawa Tengah.

Tabel 1. 5. Presentase Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	Pengangguran Terbuka (%)		
		2020	2021	2022
1	Provinsi Jawa Tengah	6.48	5.95	5.57
2	Kabupaten Cilacap	9.10	9.97	9.62
3	Kabupaten Kendal	7.56	7.55	7.34
4	Kabupaten Tegal	9.82	9.97	9.64
5	Kabupaten Brebes	9.83	9.78	9.48
6	Kota Semarang	9.57	9.54	7.60

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

Tabel 1.5 menunjukkan bahwa angka pengangguran terbuka di Jawa Tengah mengalami peningkatan pada tahun 2016 – 2020. Peningkatan presentase pengangguran tersebut menjadi faktor tingginya kemiskinan di Jawa Tengah. Tahun 2020 menjadi presentase pengangguran terbuka tertinggi sebesar 6.48%, presentase tersebut dipengaruhi oleh PHK besar-besaran karena masyarakat dihimbau untuk dirumah sehingga tidak ada aktivitas penjualan.

Tingkat pengangguran terbuka menjadi faktor meningkatnya angka kemiskinan di Jawa Tengah. Presentase tertinggi terjadi pada tahun 2020 mencapai 6.48%, hal tersebut dipengaruhi oleh adanya PHK besar-besaran akibat adanya covid 19. Pengangguran sangat erat kaitannya dengan presentase kemiskinan, standar hidup yang rendah dinyatakan secara kualitatif dan kuantitatif sebagai penghasilan yang sangat rendah, tempat tinggal yang tidak layak, kesehatan yang tidak dijamin oleh asuransi/BPJS, tingkat pendidikan yang rendah, tingginya resiko kematian bayi, angka harapan hidup yang relatif pendek dan

³⁴ Portal Berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, “Tingkat Pengangguran Terbuka Jateng Turun Jadi 5,24 Persen,” *Jatengprov.Co.Id* (Jawa Tengah, 2023).

rendah dan peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang sulit.³⁵ Hal tersebut menjadi sejumlah tantangan dari segi sosial-ekonomi, politik serta agama yang dapat meningkatkan angka penduduk miskin.³⁶

Penelitian mengenai kemiskinan dipengaruhi inflasi, indeks pembangunan manusia, dan pengangguran terbuka memiliki hasil yang tidak konsisten pada penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Nova tahun 2023 bahwa terhadap pengaruh yang signifikan antara inflasi dengan kemiskinan di Jawa Tengah, hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustina Nur Hanifah bahwa terhadap pengaruh antara inflasi dan kemiskinan di Jawa Tengah. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Roudlotul Ma'wa tahun 2023 bahwa inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Penelitian yang dilakukan oleh Theresia Ayu Sani Hutabarat, dkk. pada tahun 2023 bahwa indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nuraeni Handayani pada tahun 2022 bahwa terhadap pengaruh signifikan antara indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Indah purboningtyas, dkk. tahun 2020 bahwa indeks pembangunan manusia tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.

Penelitian oleh Ridho Andykha, dkk. dan Nenik Woyanti tahun 2018 bahwa pengangguran terbuka memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Theresia Ayu Sani Hutabarat, dkk. pada tahun 2023 dan penelitian Urwatut Diyanah, dan Syamsul Huda tahun 2022 bahwa pengangguran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap angka kemiskinan di Jawa Tengah. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Wafirrotulla elata dkk. tahun 2023 bahwa pengangguran terbuka tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Bahwa dari penelitian sebelumnya terdapat ketidakkonsistenan hasil sehingga perlu dilakukan penelitian dengan akurat.

³⁵ Yulia Adella Sari, "Pengaruh Upah Minimum Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Tengah" 10, no. 2 (2021), 123.

³⁶ Oluwaseyi Adedayo Adelowokan et al., "Unemployment, Poverty and Economic Growth in Nigeria," *Journal of Economics and Management* 35, no. 1 (2019), 6.

Faktor yang dapat mempengaruhi permasalahan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah seperti inflasi yang mengalami fluktuasi, Indeks Pembangunan Manusia dengan rata-rata belum mencapai ($IPM \geq 80$), pengangguran terbuka yang masih meningkat. Kebijakan pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan yang masih terus meningkat atau belum mendapatkan hasil yang optimal. Pembaharuan penelitian ini berdasarkan penelitian terdahulu dan faktor yang mempengaruhi presentase kemiskinan dengan memodifikasinya dengan tahun yang lebih baru. Sehingga berdasarkan hal tersebut perlu dicari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan yang bisa digunakan sebagai referensi dalam mengatasi kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian dilakukan ini untuk mengetahui bagaimana **“Pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2022”**

B. Rumusan Masalah

Latar belakang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah inflasi berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2022?
2. Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2022?
3. Apakah pengangguran terbuka berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2022?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui apakah inflasi berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2016 – 2022?
2. Mengetahui apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2016 – 2022?
3. Mengetahui apakah pengangguran terbuka berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2016 – 2022?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini diharapkan memeberikan wawasan dan pengetahuan yang luas terhadap penulis mengenai pengaruh inflasi, indeks pembangunan manusia, dan pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.

2. Bagi masyarakat dan pemangku kebijakan, dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan saran dan masukan kepada pemangku kebijakan dalam menetapkan kebijakan pembangunan ekonomi masyarakat ke depannya untuk mengurangi angka kemiskinan di Jawa Tengah.

E. Sistematika Kepenulisan

Tujuan sistematika penulisan skripsi untuk memberikan gambaran komprehensif serta panduan struktural terkait setiap bagian dan hubungannya, dengan tujuan menghasilkan penelitian yang terstruktur dan berbasis ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan yang akan saya susun dalam penelitian skripsi ini :

1. Bagian Awal

Bagian ini terdiri dari beberapa komponen diantaranya : halaman judul, pengesahan majelis penguji ujian munaqosyah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, moto, persembahan, pedoman translit Arab-Latin, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar/grafik.

2. Bagian Isi

isi terdiri dari berbagai bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian BAB I terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bagian BAB II terdiri dari : deskripsi teori yang merupakan penjelasan teori yang berkaitan dengan variabel penelitian, penelitian terdahulu yang berisikan metode yang digunakan, hasil pembahasan sebagai sumber informasi penelitian yang sedang dilakukan, membuat kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bagian BAB III terdiri dari : jenis dan pendekatan yang digunakan, populasi dan sampel penelitian, identifikasi variabel, variabel operasional, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian BAB IV terdiri dari : gambaran objek pada penelitian yang dilanjut dengan informasi pengolahan data dan pemaparan hasil penelitian pada pembahasan berisikan hasil keseluruhan mengenai pengolahan data analisis yang dilakukan oleh peneliti.

BAB V :

PENUTUP

Bagian BAB V terdiri dari : berisikan sub bab kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan yang menjawab rumusan masalah dan saran dari penelitian untuk merekomendasikan yang dianggap penting untuk dilanjutkan terkait dengan masalah yang di teliti.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir berisikan daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian, lampiran-lampiran yang berisi olah data analisis statistik, dan daftar riwayat hidup.

